

TESIS

PROGRESIVITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN

NOMOR 90/PUU-XXI/2023



Di susun oleh :

NAMA : EUDIA VIONA FRANSISKA

NPM : 235215326

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Eudia Viona Fransiska
Nomor Mahasiswa : 235215326
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Disetujui oleh :

Nama Pembimbing
1. Dr. B. Hestu C. Handoyo, SH., MHum.

2. Dr. Hyronimus Rhiti , SH.,LLM.

Tanggal
22. Juli
2025

25 Juli
2025

Tanda tangan



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Eudia Viona Fransiska
Nomor Mahasiswa : 235215326
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. B. Hestu C. Handoyo, SH., MHum.	
2. Sekretaris	Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LLM.	
3. Anggota	Dr. H. Untung Setyardi, SH., M.Hum.	

Ketua Program Studi


Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eudia Viona Fransiska

Nomor Mahasiswa : 235215326

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“PROGRESIVITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XXI/2023”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sleman, 7 Agustus 2025

Yang menyatakan:

Eudia Viona Fransiska

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, hikmat, dan kehadiran-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “PROGRESIVITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023” yang merupakan salah satu syarat kelulusan dari gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan dan berkat dari Tuhan, serta dukungan dari semua pihak, penyelesaian pekerjaan ini tidak akan mungkin terwujud. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada:

1. Sang Guru Agung, Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan saya kekuatan, kedamaian, dan kebijaksanaan selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Yth Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yth Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Dr. Yohanes Triyana, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menempuh S2 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
5. Yth. Bapak Dr. B. Hestu C. Handoyo, SH., MHum., dan Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M. sebagai dosen pembimbing tesis yang telah dengan sabar memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat berharga bagi kelancaran tesis.

6. Yth Bapak Dr. H. Untung Setyadi, SH., M.Hum selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji proposal tesis dan tesis beserta masukan dan saran.
7. Yth. Ibu Siswantana Putri Rachmatika, S.H., M.H. sebagai Analis Hukum Ahli Muda, Kabag Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, selaku narasumber yang telah berkenan memberikan kesempatan, bimbingan, serta dukungan selama proses penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
8. Orang tua dan keluarga besar Tirtodhiharjo, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan tiada henti.
9. Romo Bonifasius Abbas, Pr., Romo Suplicius Parjono, Pr., Romo Petrik Yoga Sasongko, Pr., Kelompok doa Legio Maria Rosa Mystica, keluarga besar Lingkungan St. Yohanes Paroki Santa Theresia Majenang, serta para Suster Amal Kasih Darah Mulia (ADM), yang senantiasa mendampingi saya secara spiritual melalui doa, nasihat, dan penguatan iman yang sangat berarti selama proses pengerjaan tesis ini.
10. Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (PBKH FH UAJY) 2024-2025.
11. Sahabat-sahabat asrama Stella Divina angkatan 8 yang senantiasa memancarkan cahaya bintang ilahi.
12. Dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang terlibat dalam penulisan tesis ini.

Saya percaya bahwa semua usaha, proses perkuliahan S2 dan tugas akhir ini merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam semangat kasih dan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari.

Akhir kata, saya berharap tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi inspirasi bagi peneliti yang akan datang ingin mempelajari topik serupa.

Dengan penuh rasa syukur,
salam dan doa,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eudia Viona Fransiska', with a stylized flourish at the end.

Eudia Viona Fransiska

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS.....	i
PENGESAHAN UJIAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Batasan Konsep.....	23
BAB II	25
A. Tinjauan Pustaka.....	25
1. Keberadaan Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia.....	25
a. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	25
b. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan.....	27
c. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi.....	30
d. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	33
e. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	37
2. Peran <i>Judicial Review</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	39
3. Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	42
4. Putusan MK yang bersifat <i>Judicial Activism</i> di Mahkamah Konstitusi.....	44
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	52
6. Perbedaan Substansial Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (<i>Judicial Activism</i>) dengan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 (<i>Judicial Restraint</i>).....	55

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Konteks Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	58
8. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia.....	62
B. Landasan Teori	64
1. Teori Negara Hukum.....	64
2. Teori <i>Trias Politica</i>	70
3. Teori <i>Judicial Activism</i> dan <i>Judicial Restraint</i>	71
a. Teori <i>Judicial Activism</i>	71
b. Teori <i>Judicial Restraint</i>	74
4. Teori Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural.....	78
a. Teori Keadilan Substantif.....	78
b. Teori Keadilan Prosedural.....	79
5. Teori Hukum Progresif.....	81
BAB III METODE PENELITIAN	83
BAB IV	
PEMBAHASAN.....	93
A. Analisis progresivitas kewenangan MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	93
1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	93
2. Progresivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	95
B. Analisis Penerapan dan Batasan Bentuk Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2024 dalam Rangka Supremasi Konstitusi.....	98
1. Penerapan Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	98
2. Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023..	103
3. Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Kerangka Negara Hukum....	106
4. Keadilan Substantif sebagai Dasar Putusan MK dengan Peran Sebagai <i>Positive Legislator</i>	108
5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai <i>Positif Legislator</i> dalam Bingkai Negara Hukum.....	114
6. Batas dan Pertanggungjawaban Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	117

a. Batas Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	118
b. Pertanggungjawaban Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	121
PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN.....	136

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023”. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana progresivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi terealisasi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menetapkan batas-batas penerapan kewenangan tersebut dalam konteks *judicial review* agar supremasi konstitusi tetap terjaga, sekaligus diharapkan dapat memberikan sumbangan teori dalam bidang hukum Tata Negara serta manfaat praktis bagi para pembuat kebijakan, institusi terkait, dan masyarakat luas dalam memahami dan mengelola kewenangan MK secara optimal dengan menghormati prinsip pemisahan kekuasaan demi mendukung perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi terkait, dan literatur hukum yang relevan. Sumber bahan penelitian ini terdiri dari bahan sekunder dan bahan primer; bahan sekunder diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sedangkan bahan primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menunjukkan kecenderungan untuk memperluas kewenangannya secara progresif dengan menafsirkan norma hukum secara dinamis, yang berdampak pada perubahan paradigma *judicial review* dan penguatan perlindungan hak konstitusional, serta terdapat batas-batas sejauh mana Mahkamah Konstitusi dalam melakukan progresivitas kewenangannya. Namun, progresivitas kewenangan ini juga menimbulkan kontroversi terkait batas kewenangan dan prinsip pemisahan kekuasaan. Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan langkah-langkah pengawasan kewenangan agar tetap menjaga keseimbangan fungsi konstitusional dan legitimasi lembaga.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Progresivitas Kewenangan, Putusan 90/PUU-XXI/2023, *Judicial Review*, Ketatanegaraan

ABSTRACT

This thesis is titled “The Progressiveness of the Constitutional Court's Authority in Decision Number 90/Puu-Xxi/2023.” This thesis aims to examine the extent to which the progressiveness of the Constitutional Court's authority is realized in Decision No. 90/PUU-XXI/2023 and to establish the boundaries of the application of such authority in the context of judicial review to ensure the supremacy of the constitution is maintained, while also contributing to legal theory in the field of constitutional law and providing practical benefits for policymakers, relevant institutions, and the general public in understanding and managing the Constitutional Court's authority optimally while respecting the principle of separation of powers to support the development of law and democracy in Indonesia. This thesis employs a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach, through the analysis of Constitutional Court decisions, relevant regulations, and relevant legal literature. The research materials consist of secondary and primary sources; secondary sources were obtained directly from informants through interviews at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, while primary sources are legal materials including legislation, court decisions, and official state documents. The results of the study show that the Constitutional Court in this decision demonstrates a tendency to progressively expand its authority by interpreting legal norms dynamically, which has an impact on changing the paradigm of judicial review and strengthening the protection of constitutional rights, as well as the limits on the extent to which the Constitutional Court can exercise its progressive authority. However, this progressiveness of authority also raises controversy regarding the limits of authority and the principle of separation of powers. In conclusion, the Constitutional Court needs to implement measures to oversee its authority in order to maintain the balance of constitutional functions and the legitimacy of the institution.

Keywords: *Constitutional Court, Progressiveness of Authority, Decision 90/PUU-XXI/2023, Judicial Review*